

Penentuan Materi Kurikulum Pendidikan Jenjang Perwira Polri

**DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN ABRI
SESUAI DENGAN KRITERIA YANG TELAH DITENTUKAN
MENGHADAPI PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN
ILMU PENGETAHUAN SERTA TEKNOLOGI PADA PJPT II**

Pengantar

Naskah ini diambil dari karya tulis Drs. DPM Sitompul, SH, MPH, yang berjudul "Penentuan Materi Kurikulum Pendidikan Jenjang Perwira Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan ABRI Sesuai Dengan Kriteria Yang Telah Ditentukan Menghadapi Perkembangan Masyarakat dan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Pada PJPT II", dan diringkas kembali oleh Trie Budijanti. *Redaksi*

1. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat pada PJPT II. Dalam era PJPT II masyarakat Indonesia memasuki era Industrialisasi berdasarkan pertanian yang mantap. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada PJPT II, akan maju pesat, antara lain ilmu pengetahuan, teknik nuklir, teknik lingkungan, teknik planologi, teknik kelautan, teknik industri, biologi, ilmu komunikasi, ilmu hubungan masyarakat, ilmu kedokteran bedah rehabilitasi medis, teknik informatika, radiologi, kewartawan, teknik komputer, ilmu hukum acara, ilmu hukum dasar, dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut

serta keseluruhan dapat berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak negatifnya terjadi apabila perkembangan teknologi itu menyebabkan digradasi martabat manusia, dehumanisasi, manusia dijadikan sebagai obyek teknologi belaka dan pemanfaatan negatif teknologi bagi kejahatan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperkirakan belum dapat diimbangi dengan pengembangan penelitian yang mantap dan tangguh, serta belum terkoordinasinya secara baik. Salah satu sikap awal yang sangat positif dari bangsa kita ialah adanya tekad untuk meningkatkan manusia Indonesia sebagaimana tercermin dalam Ke-

tetapan MPR Nomor: II/MPR/1988 tentang GBHN, khususnya dalam rumusan Bab IV. Pola Umum Pelita kelima cita-cita untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas telah diputuskan menjadi dasar utama pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua. Tekad perwujudan tersebut didukung dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di lingkungan ABRI dijabarkan lebih konkrit pada Surat Keputusan Pangab Nomor: Kep/04/IX/1987 tentang Pola Pendidikan ABRI.

Usaha meningkatkan kualitas manusia Indonesia (termasuk Perwira Polri di dalamnya) dengan ciri kualitas memiliki intelektual yang tinggi, cerdas, dan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai ancaman serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Di lingkungan Perwira Polri ciri kualitas tersebut ditambah lagi dengan mempunyai sikap kepribadian Pancasila, punya kemampuan 11 Asas Kepemimpinan ABRI, Kepemimpinan Komunikasi Sosial ABRI, dan Sapta Marga, serta Sumpah Prajurit.

2. Penentuan Materi Kurikulum Pendidikan Jenjang Perwira Polri Saat Ini

a. *Konsepsi-konsepsi Kurikulum.*

Ada empat macam konsepsi kurikulum yaitu:

1) Kurikulum Humanistik yaitu kurikulum hendaknya merupakan sesuatu yang dapat menunjang tercapainya kepuasan pribadi peserta didik, kurikulum sebagai proses harus dapat menemukan dan memenuhi kebutuhan individual untuk mencapai integrasi perkembangan kepribadian peserta didik dalam menuju aktualisasi, esensi pendidikannya adalah integrasi antar aspek afektif dengan aspek kognitif. Tujuannya memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menunjang tercapainya perkembangan dan kemerdekaan pribadi, metodenya menerapkan cara hubungan emosional antar peserta didik dan tenaga pendidik melalui suasana belajar yang hangat dan menyenangkan.

2) Kurikulum Rekonstruksi sosial konsep-

nya adalah kurikulum dipakai untuk membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan perubahan sosial, tanggung jawab antar kurikulum adalah untuk memperbaiki keadaan sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Tujuan utamanya untuk menghadapi peserta didik dengan tantangan hidup yang dihadapi manusia, metodenya sebanyak mungkin diusahakan oleh tenaga pendidik agar dapat membantu peserta didik menemukan minatnya.

3) Kurikulum dan teknologi konsepnya yaitu dalam merencanakan kurikulum menggunakan berbagai alat-alat dan media teknologi dibuat sebagai dasar model dan prosedur untuk penyusunan atau pengembangan materi kurikulum, tujuannya menekankan kepada segi perilaku dan empiris untuk menghadapi keadaan tertentu yang berarti dalam kehidupan/tugas di lapangan.

4) Kurikulum subyek akademik konsepnya adalah kurikulum direncanakan berdasarkan disiplin Akademik sebagai titik tolak untuk mencapai ilmu pengetahuan yang dicita-citakan oleh peserta didik, tujuannya melatih peserta didik dalam menggunakan ide-ide dan proses-proses untuk memecahkan masalah secara ilmiah, metode yang digunakan antara lain perorangan dan penemuan, pendekatan penyelesaian masalah.

b. *Hubungan Kurikulum dengan Tujuan Pendidikan.*

Secara sepintas lalu saja pengertian tentang kurikulum dapat diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di bawah asuhan sekolah. Sebenarnya dalam hubungannya dengan usaha pendidikan, kurikulum adalah merupakan alat pembentukan.

Kurikulum sebagai alat pembentuk harus disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Oleh karena, melalui kurikulum itu lembaga berusaha membawa peserta didik kepada tujuan pendidikan, adapun tujuan akhir dari pendidikan itu adalah mendidik peserta didik agar dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Baik berguna bagi dirinya sendiri maupun berguna bagi masyarakat bangsa dan negaranya. Dengan demikian tujuan pendidikan itu tidak boleh berbeda, tidak boleh

dipisah satu dengan yang lain, dengan filsafat negara dan bangsa. Di bawah ini merupakan gambar hubungan kurikulum dengan filsafat negara serta hubungan antar kurikulum dengan tujuan pendidikan.

HUBUNGAN KURIKULUM DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN



3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Kurikulum Pendidikan Perwira Polri.

a. Peluang

1) Intern

a) Adanya kebijaksanaan dan keputusan politik dan Pimpinan ABRI/Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme prajurit ABRI/Polri.

b) Dialog antara lembaga pendidikan Perwira Polri dengan pimpinan masyarakat (pejabat-pejabat tinggi negara) telah diprogramkan dalam kurikulum, hal ini dapat menciptakan "Iklim Keterbukaan" dan persepsi yang sama dalam menangani dan menggapai masalah sosial di masyarakat.

c) Adanya ketentuan-ketentuan peraturan yang mengatur tentang lembaga Pendidikan Polri (dalam Sisdik Polri dan Sisdik ABRI) tentang isi kurikulum pengetahuan-pengetahuan tertentu yang harus diajarkan.

d) Adanya ujian-ujian dan sistem seleksi terhadap peserta didik serta disiplin mengikuti

pelaksanaan seluruh isi kurikulum yang dibuat.

e) Adanya tenaga-tenaga pendidik yang siap bertugas melaksanakan isi kurikulum dengan sarana-sarana yang dihadapi.

2) Ekstern

a) Adanya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang dapat dipergunakan untuk mendukung pembenahan struktur pendidikan dan kurikulum lembaga pendidikan Perwira Polri.

b) Adanya Instruksi Presiden RI No. 8 Tahun 1985 tentang pedoman belajar di luar negeri bagi Sarjana Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mengirim tenaga pendidik Polri untuk mempelajari kurikulum pada Program S-2 dan S-3 di luar negeri.

c) Adanya bantuan biaya dan bantuan dari luar negeri.

d) Tujuan nasional selaras dengan tujuan pendidikan jenjang Perwira Polri.

b. Kendala

Pendidikan menurut hakekatnya tidak akan terlepas dari situasi krisis dan kendala-kendalanya sebagai berikut:

1) *Intern* terdiri dari: tenaga pendidik yang hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, tenaga pendidik belum sepenuhnya berhasil mampu menciptakan belajar aktif dalam menggairahkan yang mampu mendorong kreatifitas peserta didik, mutu tenaga pendidik di SELAPA, AKPOL, SECAPA masih belum banyak yang profesional, alat-alat bantu proses belajar mengajar minimal kualitas maupun kuantitasnya, isi kurikulum belum sesuai dengan perkembangan ancaman kejahatan, tenaga-tenaga manajer pendidik yang profesional dalam penyusunan kurikulum kepemimpinan masih kurang, kualitas intelektual/nilai Ebtanas murni/NEM calon peserta didik di AKPOL, SELAPA cenderung rendah, adanya materi kurikulum yang sama antara jenjang pendidikan SESPIMPOL, PTIK, SELAPA, SEPA, AKPOL, dan SECAPA, yang belum menerima jenjang/tingkatan, waktu pendidikan (jam pelajaran) terbatas jumlahnya, materi pelajaran berjudul "Teori Kepemimpinan" dirasakan masih sedikit, masalah pelajaran kepemimpinan tidak diajarkan oleh argu-

men/instruktur yang benar-benar pantas untuk dijadikan model/figur seorang pemimpin, suasana pemberian pelajaran kepemimpinan di ruang kelas kurang mencerminkan bahwa pelajaran tersebut "Sangat pentingnya" untuk dipelajari dan dipahami, latihan-latihan keterampilan pengambilan keputusan untuk seorang calon pemimpin masih perlu ditingkatkan, materi kurikulum tentang mental kejuangan antara SELAPA dengan sekolah Perwira Polri dan SECAPA Polri, latihan keterampilan untuk memimpin diskusi masih kurang terutama pada jenjang pendidikan PTTK, SELAPA, AKPOL maupun SECAPA dalam wujud keterampilan diskusi serta seminar guna memecahkan sesuatu masalah kepolisian atau masalah Kamtibmas, materi kurikulum tentang pelajaran bahasa asing, materi kurikulum tentang manajemen, mulai dari SESPIM sampai SECAPA, kesinambungan materi kurikulum jenjang pendidikan Perwira Polri, materi pendidikan tentang hukum, materi pendidikan tentang statistik, materi pendidikan tentang Psikologi massa dan psikologi kriminal, masalah besar yang menjadi kendala bagi para pengembangan kurikulum adalah bagaimana memilih materi pelajaran dari sekian banyaknya disiplin ilmu yang ada.

2) *Ekstern* terdiri dari: aspek struktural pendidikan dan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990, belum selesai, antara Sisdik ABRI/Polri dan Sisdik Nasional. Tenaga dalam Sisdik Nasional belum sama dengan tenaga pendidik di Sisdik ABRI/Polri. Angka Kredit pada jenjang karir tenaga pendidik dasar di Sisdik ABRI/Polri cenderung belum tertata. Kepedulian sosial masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan Polri. Sektor pendidikan dari APBN tentang lembaga pendidikan Polri dananya tidak memadai untuk membangun Lembaga Pendidikan Perwira Polri yang modern dengan kurikulumnya.

Bantuan biaya dari luar negeri untuk peningkatan ilmu pengetahuan tentang kurikulum bagi tenaga pendidik. Kurang intensif kerja sama tentang penelitian dan pengembangan bahan pelajaran tentang teknologi kepolisian antara instansi pemerintah dan swasta dengan Lemdik Perwira Polri. Pengem-

banan kurikulum untuk upaya yang tepat. Kepedulian "dunia kampus" Lembaga Pendidikan Perwira Polri terhadap fakta-fakta dan data-data masalah sosial di masyarakat. Para perencana pengembangan kurikulum seringkali menghadapi tuntutan yang bersifat realistik maupun tidak realistik dari berbagai pihak. Disiplin ilmu yang sama belum sepenuhnya disesuaikan dengan kurikulum sistem kredit dari sistem Pendidikan Nasional. Para Purnawirawan Polri dengan Strata S-2 belum sepenuhnya tersalur sebagai tenaga Pendidik di Universitas atau Karyawan Swasta Perusahaan.

4. Tuntutan Materi Kurikulum Pendidikan jenjang Perwira Polri, dalam Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan ABRI pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II.

a. Kecenderungan masyarakat pada PJPT II.

1) Kecenderungan perkembangan masyarakat.

Pada akhir PJPT I ditandai dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan/teknologi. Kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut:

a) Luar negeri

(1) Bidang politik yaitu mencairnya ketegangan hubungan Timur dan Barat, menonjolnya peranan Jepang, RRC dan masyarakat Eropa akan turut mewarnai perubahan polarisasi politik. Konflik Timur Tengah, perkembangan kehidupan politik di negara-negara Asia Tenggara, tampilnya Indonesia sebagai pemimpin gerakan Non Blok.

(2) Bidang ekonomi yaitu terjadinya berbagai reformasi dan restrukturisasi di Eropa Timur yang diikuti penerapan sistem ekonomi pasar. Perkembangan ekonomi yang pesat di pasar tunggal Eropa dan Amerika merajalelanya relokasi Industri dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, kerja sama Asean di bidang ekonomi.

(3) Bidang sosial budaya yaitu kemajuan telekomunikasi dan informasi mengakibatkan wajah muka bumi yang terintegrasi kelihatan transparan, penggeseran ke era informasi yang ditandai dengan penggunaan teknologi dalam

semua kehidupan masyarakat masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Wilayah Asia Tenggara masih menjadi ajang perdagangan narkoba gelap.

(4) Bidang Hankam yaitu munculnya gerakan-gerakan radikal di berbagai negara yang mempergunakan teror sebagai salah satu alat untuk mencapai kegiatan politiknya, gangguan keamanan dalam negeri di masing-masing negara Asean masih akan timbul dengan skala dan wujud berbeda, kejahatan yang berdimensi internasional akan berkembang karena dipengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b) Dalam negeri

(1) Geografi kondisi pantai, pulau-pulau yang terbentang luas di negara RI, kondisi geografis kota-kota besar yang dekat dengan Ibukota RI (Jakarta), reklamasi terhadap pantai-pantai Utara Pulau Jawa dan Sumatera.

(2) Demografi yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk di kota-kota besar, pendidikan.

(3) Sumber daya alam yaitu pembangunan dan eksploitasi hasil tambang, perikanan, hutan yang tidak terawasi dengan baik, pengelolaan eksploitasi hasil sumber daya alam.

(4) Ideologi yaitu kelompok ekstrim yang menentang beberapa kebijaksanaan pemerintah, adanya ideologi-ideologi dari luar negeri yang mempengaruhi kelompok-kelompok Eka/Eki.

(5) Politik yaitu kesadaran politik masyarakat yang meningkat maju, budaya politik dan pendidikan politik "Keterbukaan" semakin berkembang sehingga dituntut aparat pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah "terbuka" di dalam mengambil keputusan politik, Dwi Fungsi ABRI dalam bidang sosial politik, Kampus Universitas, Institut, Akademi, akan berkembang menjadi motor timbulnya budaya politik "Keterbukaan" khususnya dalam hal menyoroti fakta-fakta kehidupan politik dan masalah sosial tingkat nasional maupun daerah. Politik hukum dalam rangka mewujudkan kondifikasi hukum.

(6) Ekonomi pada pembangunan PJPT II yang akan datang sarana dan prasarana transportasi lintas pantai Utara pulau Jawa akan

semakin baik, karena didukung dengan perkembangan pusat-pusat perdagangan, industri, obyek wisata, dan pengembangan teknologi pertanian yang maju. Berkembangnya industri dan perdagangan dengan "modal raksasa" dapat membuat industri/perdagangan kecil menengah "gulung tikar" satu-satu. Upah kerja pegawai/buruh yang tidak sepadan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan dampak negatif.

(7) Sosial budaya yaitu sektor agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sektor pendidikan, sektor kebudayaan, sektor kesehatan.

2) Kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas perlu diantisipasi karena dapat mengganggu Kamtibmas. Antisipasi lebih kongkrit dapat diwujudkan antara lain melalui kurikulum dalam pendidikan dan latihan.

b. *Kecenderungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada PJPT II.*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup maju antara lain terlihat dengan perkembangan industri pesawat terbang, perkapalan dan otomotif, pengembangan dan penggunaan teknologi maju. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara keseluruhan dapat berdampak positif dan negatif terjadi apabila perkembangan teknologi menyebabkan degradasi martabat manusia, dehumanisasi dan menyebabkan manusia hanya sebagai obyek teknologi belaka. Lembaga-lembaga penelitian cenderung belum terkoordinasikan secara baik, demikian pula lembaga-lembaga penelitian perstatistikan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif.

Perkiraan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut:

1) *Geografi.* Perkembangan pembangunan listrik di tepi jalan raya dapat mengakibatkan gangguan lalu-lintas, pembangunan toko-toko, rumah/gedung-gedung yang tidak serasi dengan pembuatan jalan raya sangat mengganggu Kamtibmas Lantas.

2) *Demografi.* Pertumbuhan penduduk yang terpusat di kota-kota dapat berdampak mengakibatkan pemakai jalan menjadi bertambah dan dapat menimbulkan kemacetan lalu-lintas.

3) *Sumber Daya Alam*. Pembangunan sumber daya alam yang maju pesat yang diikuti oleh pengangkutan hasil-hasil industri-nya oleh truk pengangkut, mempunyai dampak negatif terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas.

4) *Ekonomi*. Jumlah Show-room mobil dan motor yang meningkat membuat daya tarik pembeli kendaraan bermotor dan menimbulkan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah stasiun bus, pangkalan ojek, stasiun kereta api yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas bila tidak ditata dengan baik. Berkembangnya jumlah tempat parkir.

5) *Sosial Budaya*. Pengaruh televisi dan film-film yang bertema kekerasan dalam berlalu-lintas serta berbagai kejahatan dapat ditiru oleh calon-calon pelaku tindak pidana, sikap tingkah laku yang negatif dan tidak tertib karena kurang pengetahuan dalam berlalu-lintas dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan pelanggaran yang ringan vonisnya, cenderung tidak menimbulkan efek jera. Metoda pembinaan narapidana di LP yang tidak baik dan tidak terpadu dapat berdampak pengulangan terjadinya tindak pidana.

6) Dari kecenderungan-kecenderungan yang berdampak negatif mengganggu Kamtibmas tersebut di atas perlu diantisipasi dengan kepemimpinan yang handal sesuai kriteria tertentu yang telah ditetapkan ABRI.

7) *Kebijaksanaan penentuan materi kurikulum menurut Sisdikmas*.

a) Kurikulum adalah sarana dari suatu sistem pendidikan nasional. Masyarakat industri adalah masyarakat yang hidup dan dihidupi oleh sains dan teknologi. Oleh sebab itu pelayanan sains dan teknologi menempati prioritas tinggi dalam kurikulum, terutama pada pendidikan dasar.

Menghadapi dunia "yang semakin mengecil" pendidikan bahasa asing yaitu bahasa Inggris, Jepang, Cina merupakan keharusan melihat posisi Indonesia di kawasan politik, tanpa mengurangi perhatian kita terhadap pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

b) Melihat keragaman potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta ke-

bhinekaan bangsa kita (terdiri dari suku-suku bangsa), maka kurikulum yang uniform di lingkungan Polri akan tidak sesuai dengan kedudukan masyarakat setempat (daerah).

c) Pendidikan moral dan agama dalam masyarakat industri modern penting untuk dilaksanakan, sebab pada masyarakat industri modern membawa konsekuensi nilai-nilai baru yang bukan tidak mungkin dapat menggoyahkan kesadaran moral dan agama kita, sebagaimana dialami oleh negara-negara industri modern.

8) *Kebijaksanaan penentuan materi kurikulum Sisdik ABRI*.

a) Menurut sistem pendidikan ABRI (keputusan Pangab No.Kep/04/IX/1987) tanggal 7 September 1987, kurikulum pendidikan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

Kurikulum diarahkan kepada tercapainya kesinambungan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup tujuan pendidikan, sasaran pendidikan, struktur kurikulum, metoda pengajaran, waktu pelaksanaan pendidikan.

b) Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan Polri adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian/sikap mental kejuangannya, kemahiran keterampilan dan kemampuan fungsi teknis profesi, yang diselenggarakan melalui pengajaran/kuliah, pengasuhan, latihan.

9) *Tuntutan materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri*. Materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri harus sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan serta teknologi pada PJPT II. Materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri harus sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional dan tujuan pendidikan ABRI/Polri. Materi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan tugas dan tuntutan kemampuan organisasi Polri pada PJPT II. Materi kurikulum harus sesuai dengan kriteria kepemimpinan ABRI pada PJPT II. Kurikulum jenjang pendidikan Perwira Polri harus mampu menjawab ancaman kejahatan-kejahatan pada PJPT II seperti tersebut di atas dalam mata pelajaran.

5. Upaya Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan ABRI Melalui Penentuan Materi Kurikulum Pendidikan Jenjang Perwira Polri Menghadapi Perkembangan Masyarakat dan Ilmu Pengetahuan Serta Teknologi pada PJPT II.

a. Upaya Jangka Pendek.

Upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan ABRI melalui penentuan materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri tidak dapat dilaksanakan sekaligus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun, melainkan dapat dilakukan secara bertahap melalui upaya jangka panjang, upaya jangka sedang, upaya jangka pendek. Adapun upaya-upaya dalam jangka pendek perlu adanya evaluasi kurikulum.

Evaluasi merupakan usaha untuk mengetahui, menelusuri atau menjajagi antara lain materi kurikulum atau program pendidikan, apakah pilihan-pilihan dalam menentukan kurikulum memadai atau tidak, demikian menurut pendapat DR. Say Lor.

Tujuan pendidikan di lingkungan Polri (Sespim Pol, PTIK, Selapa, Sepa, Akpol, Secapa) apabila dikaitkan dengan tujuan Pendidikan Nasional ternyata selaras dan sinkron, sebab tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan/profesionalisme yang tinggi.

Selanjutnya dalam jangka pendek perlu diadakan penelitian tentang kurikulum dari Sespim Pol, PTIK, Selapa, Akpol, Sepa dan Secapa Polri. Penelitian kurikulum tersebut diarahkan kepada isi materi kurikulum dan isi bahan ajaran dari mata pelajaran. Data pelajaran dan isi bahan ajaran yang perlu diteliti lagi adalah mata pelajaran kepemimpinan yaitu perlu atau tidak bahwa teori-teori kepemimpinan di Sespim Polri ditambah mata pelajarannya, penambahan jumlah jam mata pelajaran kepemimpinan di Sespim Polri, perlu dipikirkan setelah diteliti tentang judul pelajaran kepemimpinan apakah mata pelajaran harus berbeda dengan jenjang pendidikan Perwira yang lain, metode yang

digunakan harus lebih canggih daripada metode yang digunakan di jenjang pendidikan Perwira Polri lainnya, pengajaran dari mata pelajaran kepemimpinan di Sespim Polri harus dipilih seorang pengajar yang sukses di lapangan dan menjadi idola di lingkungan Polri.

Mata pelajaran tentang mental kejuangan di Sespim Polri pemberian nama tiap-tiap mata pelajaran harus berbeda dengan nama mata pelajaran di sekolah Perwira Polri lainnya. Mata pelajaran tentang Suplementasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Cudek, Doktrin Sospol ABRI, Teori Pelestarian nilai, berpikir integralistik Indonesia, Kode Etik Kepolisian. Ketujuh mata pelajaran di atas khusus di Sespim Polri harus menghasilkan sikap ketauladanan, sikap ramah, sikap menarik, sikap rendah hati. Mata Pelajaran Dharma Pusaka 1945, di Lemdik Selapa dan Sepa cenderung hampir sama isi bahan ajarannya. Mata pelajaran manajemen pada pendidikan di PTIK dan AKPOL, harus ada kesinambungan isi bahan ajarannya. Mata pelajaran ilmu Pengetahuan Sosial, mata pelajaran Sosiologi Desa dan Kota, mata pelajaran tersebut diberikan di Selapa, Sepa, dan Secapa, dengan judul/nama mata pelajarannya sama dengan mata pelajaran kriminologi pada jenjang pendidikan PTIK, Selapa, AKPOL, Sepa dan Secapa Polri. Judul/nama mata pelajaran tersebut sama judulnya. Mata pelajaran Antropologi perlu diajarkan di Lemdik Polri. Jenjang pendidikan Selapa Polri, tidak diajarkan mata pelajaran Antropologi, data pelajaran statistik di lingkungan Lemdik Polri, Secapa, Sepa, Akpol, Selapa, PTIK, judulnya mata pelajaran tersebut. Mata Pelajaran psikologi materi ini pada jenjang pendidikan Perwira Polri perlu disusun lebih sempurna lagi sehingga kelihatan perbedaan jenjang bobot mata pelajarannya. Mata pelajaran Hukum Kepolisian materi kurikulum ini perlu dibenahi secara berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan, data pelajaran Hukum Acara Pidana, penentuan materi, kurikulum Hukum Acara Pidana di Secapa, Sepa Akpol, Selapa, PTIK tentang masalah judul nama mata pelajarannya cenderung sama dan perlu penyempurnaan mata pelajaran Hukum Pidana diberikan

dengan judul/nama yang bervariasi pada Lemdik Polri Secapa, Sepa, Selapa, Akpol dan PTIK. Mata pelajaran Kriministik menjadi materi kurikulum pada jenjang pendidikan Perwira Polri adalah penting.

Penelitian terhadap materi kurikulum lainnya pada jangka pendek dilakukan terhadap hal-hal seperti tersebut di atas, juga perlu dilakukan penelitian terhadap materi-materi bahan ajaran mata pelajaran lainnya di: Secapa, Sepa, Akpol, Selapa, PTIK dan Sespim Polri. Pengembangan kurikulum tahap ke-I, setelah dilaksanakan penelitian terhadap kurikulum yang berlaku saat ini, maka selanjutnya dilaksanakan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan guna menetapkan berbagai sasaran-sasaran, mengidentifikasi tujuan-tujuan dan mengarah kepada revisi dan perbaikan kurikulum.

b. Upaya Jangka Sedang

Untuk menentukan materi kurikulum jenjang Perwira Polri pada PJPT II, antara lain dapat ditempuh melalui cara-cara seperti melakukan penelitian kurikulum jenjang pendidikan Perwira Polri dilakukan dengan kriteria penelitian sebagai berikut: materi kurikulum harus sesuai dengan kriteria kepemimpinan ABRI pada PJPT II, materi kurikulum harus mampu menjawab tentang gangguan Kamtibmas pada PJPT II. Pengembangan kurikulum tahap II ini harus ditetapkan model pengembangannya pada Tahap I (jangka pendek), meliputi aspek fisik, aspek mental dan aspek Akademis. Ada dua jenis model yang dapat ditempuh di dalam mengembangkan kurikulum pada jangka sedang yaitu model pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran, dan model yang lain adalah pendekatan yang berorientasi pada tujuan pendidikan. Pada jangka sedang perlu diadakan pengembangan kurikulum melalui tiga pentahapan yaitu pengembangan program tingkat lembaga yang perlu dikembangkan pada tahap ini adalah merumuskan tujuan institusional, menetapkan isi dan struktur program kurikulum, menyusun strategi pelaksanaan kurikulum.

Pengembangan program setiap bidang studi pada kegiatan ini disusun tentang tujuan

kurikulum, merumuskan tujuan instruksional dan menetapkan pokok/sub pokok bahasan dari mata pelajaran baru sebagai penelitian kurikulum yang telah dipilih untuk diajarkan.

Pengembangan program pengajaran perlu dilakukan di kelas oleh Gadik/Staf Pengajar, melalui satuan pelajaran. Pengembangan pokok bahasan mata pelajaran baru yang berdasarkan pengamatan penulis sewaktu tugas belajar di Akpol, PTIK, dan Sespim Polri, ditambah dengan pengalaman penulis sebagai Staf Pengajar di Secapa Polri, Sepa Polwan, Dosen di PTIK digabungkan dengan pengalaman tugas di lapangan, maka didapatkan pengembangan terhadap pokok bahasan mata pelajaran di antaranya Statistik Kepolisian, Sistem Pendidikan Pidana I, Sistem Peradilan Pidana II, Politik Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, Metoda Penelitian Kepolisian, Hukum Kepolisian II, Antropologi Kepolisian dan Teknologi Kepolisian.

Sistem kredit semester tersebut harus diterapkan di PTIK dan Akpol untuk memenuhi beban Studi Sarjana Muda dengan 120 SKS dan beban Studi Sarjana dengan 160 SKS. Sistem Kredit Semester masih perlu diterapkan pada jangka sedang, khususnya di Lemdik PTIK dan Akpol yang ditujukan pada pelajaran baru.

DHARMA - WASPADA

c. Upaya Jangka Panjang

Melakukan penelitian kurikulum yang belum sampai terselesaikan belum dilaksanakan pada tahap jangka sedang, dan lebih memantapkan penataan kurikulum menghadapi PJPT II. Mengembangkan kurikulum dengan menyusun mata pelajaran baru dan mengganti "mata pelajaran lama" yang sudah kurang sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi pada PJPT II serta kurang sesuai dengan peningkatan kualitas kepemimpinan ABRI/Polri pada PJPT II, meliputi aspek fisik, aspek mental, dan aspek Akademis.

Mewujudkan kepedulian sosial masyarakat (partisipasi masyarakat) terhadap keberadaan Lembaga Pendidikan, jenjang Perwira Polri, baik secara moril maupun materil. Mengupayakan agar sektor pendidikan dari GBHN

tentang Lembaga Pendidikan jenjang Perwira Polri semakin meningkat biayanya dan memadai, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kurikulum yang lebih mantap.

Memanfaatkan terus menerus bantuan biaya dari luar negeri, untuk mengirim tenaga Dosen/Gadik guna belajar disiplin ilmu "Baru" yang dibutuhkan Polri melalui program S-2 dan S-3 di luar negeri. Lebih meningkatkan dan memantapkan kerja sama penelitian dan pengembangan tentang mata pelajaran teknologi Kepolisian dengan Universitas/Kepolisian di luar negeri. Lebih meningkatkan "Kepedulian dunia kampus", Lemdik jenjang Perwira Polri terhadap faktor-faktor dan data-data masalah sosial di masyarakat yang dilaksanakan dan terprogram dalam bentuk salah satu materi dari KKN.

Mengembangkan sarana dan metode pengajaran modern guna mendukung pelaksanaan kurikulum melalui kerja sama dengan Universitas negeri yang terkemuka.

6. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di depan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Persoalan penentuan materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira saat ini masih terdapat mata pelajaran yang tumpang tindih dan belum nampak jelas sebagai suatu kesinambungan, sehingga hasil akhir (out put) belum sepenuhnya mampu mendukung secara maksimal pelaksanaan tugas Polri khususnya tugas kepemimpinan dalam organisasi.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan materi kurikulum jenjang pendidikan Polri adalah faktor peluang dan faktor kendala.

c. Tuntutan materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri dalam meningkatkan kepemimpinan ABRI pada Tahap ke II.

d. Upaya menentukan materi kurikulum pendidikan jenjang Perwira Polri untuk dapat mewujudkan kualitas kepemimpinan ABRI melalui pentahapan jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

★ *Seorang yang pandai adalah orang yang mampu menutupi ketidaktahuannya dengan cerdik.*

★ *Dunia akan tampak lebih cerah bila dilihat di balik senyuman.*

★ *Cobalah menghargai segala sesuatu yang Anda miliki sekarang sebelum kehilangan dia.*

BERITA BERGAMBAR

PEMBEKALAN PKB JUANG

■ Menko Polkam Soesilo Soedarman memberikan pembekalan awal PKB Juang Pasis Sesko Angkatan/Polri (kanan atas). ■ Dari kiri: Wadan Sesko ABRI, dan Seskoal, Ketua Bappenas, dan Seskoal, Kasespim Polri (tengah). ■ Pasis Seskoal, Seskoal, Seskoau, Sespim Pol menjalin kebersamaan (bawah).



KEBERSAMAAN & KEPEDULIAN SOSIAL



■ Ka Sespim Polri menyerahkan beasiswa kepada anak yatim piatu (kiri atas). ■ Gerak jalan santai Bhayangkari, Patun, Pasis Sespim Pol. (kanan atas). ■ Tertua, terlama dinas di Sespim Pol. ± 30 th. menerima hadiah dari Ka Sespim Pol. (tengah). ■ Tim Volley Ball Patun vs Tim Volley Ball Pasis (kiri bawah). ■ Tim Volley Ball Pasis vs Secapa Sukabumi (kanan bawah).



KEMITRAAN

■ Ust. Zaenudin MZ. menyampaikan uraian Isra' Mi'raj th. 1994 dengan gayanya yang khas (atas). ■ Pasis, Patun Bhayangkari & Warga sekitarnya sedang mendengarkan Ustadz (tengah). ■ Dirjianbang Kol. Pol. Drs. H. Zakaria mewakili Kasespim menyerahkan Cindera mata Kemitraan (bawah).



SUASANA BELAJAR TEMPO DOELOE



Serius di ruang kelas besar



Istirahat

SUASANA BELAJAR SEKARANG



LAT POSKO

Kasespim Pol. memberikan pengarahan pada seluruh pelaksana Lat Posko Pol. ▶



Kapolda diperankan oleh Pasis Mayor Pol. Drs. Wahyono sedang terima tilpon dari Gubernur. ▶



Patun, Letkol Pol. Drs. A. Hasan terjun langsung untuk membimbing dan menuntun. ▼



EVALUASI TAHAP II



Belajar dimana pun, kapan pun berada, apa yang keluar?



Suasana Ujian
Tahap II.



KESEDERHANAAN



Ka Sespim Polri (pojok kiri) mengadakan berbuka puasa dan Shalat Taraweh bersama di Rumah Dinas Kasespim Pol.



Ny. Soehardi dan Ny. F. Harnantoko sedang menikmati hidangan berbuka puasa.